

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1. Ibn Qudāmah berpendapat bahwa jika suami memberikan hak talak kepada istri, maka hak tersebut berlaku selamanya dan dapat digunakan kapan saja, mirip dengan konsep wakalah. Talak yang jatuh dalam hal ini adalah talak satu raj'i, yang dapat dirujuk kembali selama masa iddah. Namun, jika istri menjatuhkan talak tiga, meskipun suami berniat hanya memberikan talak satu, maka talak tiga tetap sah dan penyerahan hak talak dapat dibatalkan oleh suami sebelum digunakan oleh istri, tetapi jika istri telah menggunakan hak tersebut, maka talak yang jatuh tidak bisa dibatalkan.
- 5.1.2. Metode istinbath yang digunakan oleh Ibnu Qudamah sejalan dengan metode yang diterapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sebagai bagian dari mazhab Hanbali yang ia anut. Dalam menggali hukum, Ibnu Qudamah mengutamakan sumber hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta memperhatikan fatwa para sahabat jika tidak ada nash yang jelas. Sebagai contoh, mengenai kebolehan penyerahan hak talak kepada istri, Ibnu Qudamah merujuk pada tindakan Nabi Muhammad SAW yang memberikan hak pilihan kepada istri-istrinya, yang tercermin dalam surat Al-Ahzab (28-29) dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menurut Ibn Qudāmah, ketika Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk meminta nasehat dari orang tuanya, ini menunjukkan bolehnya penyerahan hak talak dan dalam hadis ini nabi menggunakan lafaz penyerahan yang kinayah (tanpa ada lafaz talak didalamnya). Dalam analisis penulis beliau juga menggunakan pendekatan qiyas, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, dengan menyamakan penyerahan hak talak kepada istri dengan wakalah (perwakilan) dalam hal lain, seperti memerdekakan budak. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa siapa pun yang sah menjadi wakil dalam satu urusan, sah pula dalam urusan lainnya, asalkan ada kesamaan kausa.

Pendekatan ini mengarah pada pemahaman bahwa penyerahan hak talak kepada istri adalah sah, sejauh tidak melanggar prinsip syariat.

- 5.1.3. Konsep penyerahan hak talak kepada istri yang dikemukakan oleh Ibn Qudāmah memberikan perspektif yang lebih adil dalam pernikahan dengan memberikan perempuan hak untuk menentukan kelangsungan rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang bertujuan menciptakan keseimbangan dalam relasi suami istri, sebagaimana dijelaskan oleh Fatima Mernissi dan ditegaskan dalam ajaran Islam bahwa semua manusia setara kecuali dalam ketakwaan. Meskipun penyerahan hak talak ini masih belum diadopsi dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan yang berlaku saat ini adalah cerai gugat di pengadilan agama, namun konsep ini tetap relevan untuk dipertimbangkan sebagai alternatif dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan. Jika penyerahan hak talak ini diintegrasikan dalam sistem hukum keluarga, misalnya dengan mencantumkannya dalam akad nikah atau perjanjian pernikahan, maka perempuan dapat memiliki akses yang lebih mudah dan adil dalam proses perceraian, tanpa harus menghadapi prosedur hukum yang panjang dan kompleks. Negara-negara seperti Pakistan telah menerapkan konsep ini dalam sistem hukum mereka, menunjukkan bahwa pendelegasian dapat menjadi instrumen hukum yang sah dan aplikatif dalam memberikan hak yang lebih luas bagi perempuan. Oleh karena itu, pemikiran Ibn Qudāmah tentang talak tafwid dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk mengembangkan regulasi yang lebih responsif terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian, sehingga hukum Islam dapat diterapkan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

5.2 Implikasi

Implikasi dari pandangan Ibn Qudāmah mengenai penyerahan hak talak kepada istri menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam, konsep wakalah dapat

diterapkan dalam urusan rumah tangga, khususnya dalam hal talak. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi istri untuk menggunakan hak talaknya kapan saja, selama belum dibatalkan oleh suami sebelum digunakan. Namun, kebebasan ini tetap memiliki batasan dalam syariat, seperti talak yang dijatuhkan tetap mengikuti ketentuan hukum Islam, termasuk kemungkinan rujuk dalam talak raj'i. Selain itu, metode istinbath yang digunakan oleh Ibn Qudāmah menegaskan pentingnya merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, serta fatwa sahabat dalam menetapkan hukum, yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam menyamakan suatu hukum dengan konsep lain, seperti wakalah. Implikasi lainnya adalah bahwa pemahaman ini dapat berpengaruh pada praktik hukum keluarga Islam, terutama dalam memberikan kejelasan mengenai hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian sesuai dengan prinsip syariat.

5.3 Saran

- 5.1.4. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyerahan otoritas hak talak kepada istri menurut pendapat Ibn Qudāmah, yang tidak hanya berfungsi sebagai tambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam. Namun, tentu saja penelitian ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan kajian terkait perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan, guna menghasilkan analisis hukum Islam yang lebih seimbang, moderat, dan relevan dengan kebutuhan zaman.
- 5.1.5. Kajian mengenai penyerahan otoritas hak talak kepada istri menurut Ibn Qudāmah memberikan sumbangan yang berarti dalam proses pembaharuan hukum Islam, terutama di Indonesia. Ibn Qudāmah menawarkan perspektif yang memungkinkan fiqh klasik untuk lebih terbuka, moderat, dan seimbang, sehingga perempuan memperoleh kuasa lebih besar atas dirinya, khususnya dalam pernikahan. Bagi lembaga hukum di Indonesia, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan dan keputusan hukum yang

lebih spesifik mengenai perkawinan. Pendapat dan argumentasi yang diajukan juga dapat menjadi bahan studi perbandingan dalam merumuskan undang-undang atau peraturan yang lebih tepat mengenai perlindungan perempuan dalam perkawinan yang masih terkesan umum.. Namun demikian, pembahasan dalam penelitian ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menghasilkan analisis hukum yang lebih komprehensif dan universal.

5.4. Keterbatasan Studi

Fokus studi ini adalah pandangan Ibn Qudāmah terkait penyerahan hak talak kepada istri dalam mazhab Hanbali. Pembahasan mengenai hak talak dalam hukum Islam sangat luas, mencakup berbagai aspek seperti talak raj'i, talak bain, dan talak tiga, serta implikasi dari masing-masing jenis talak tersebut. Namun, dalam studi ini, penulis hanya menyoroti permasalahan penyerahan hak talak oleh suami kepada istri dan bagaimana hal ini dipersamakan dengan konsep wakalah. Oleh karena itu, penulis hanya memaparkan pandangan Ibn Qudāmah serta metode istinbath yang ia gunakan dalam menjustifikasi penyerahan hak talak tersebut, tanpa menyertakan pandangan dari mazhab lain atau analisis komparatif terhadap konteks hukum keluarga modern.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, I. S. M. A. (2003). *Radd Al-Muhtar*. Dar al Kutub al-ilmiyyah.
http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9439
- Abror, K. (2019). Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga. *Asas*, 11(01), 24–37.
<https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4640>
- Adiwinata, S. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(1), 40–60. <https://doi.org/10.37092/ej.v3i1.222>
- Ahmad, S. M. (2008). *Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala, alih bahasa Said Abadi, A. Luthf*. Pustaka Azzam.
- Akhmad Hanafi Dain Yunta dkk. (2023). Keabsahan Tafwīd Talak Dalam Tinjauan Fikih Munākahāt (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah Dan Ibnu Hazm). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4, 532–557.
file:///E:/Bismillah Semhas 2024/Analisis Data/Mewakilkkan Talak/REFERENSI MEWAKILKAN TALAK 2.
- Al- Hamdani, H. S. . (2002). *Risalah Nikah*. Pustaka Amani.
- Al-Hussaini, I. T. A. B. ibn M. (n.d.). *Kifayah Al Akhyar*. Daar Al-kutub al'ilmiyah.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1991). *I'lam al-muwaqi'in `an rabb al-`alamin / Ibn Qayyim al-Jauziyyah*. Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Al-Jaziri, A. (n.d.). *Kitab al-Fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah, Juz IV*. Daar Al-Fikr.
- Al-Kasani, A. (2003). *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Sharai'*. Daar Al-kutub al'ilmiyah.
- Al-Maqdisi, B. al-din A. A.-R. ibn I. (n.d.). *Al-'Uddat fi Syarh al-Umdah*. Maktabah al-riyadh al- haditsah.
- Al-Munawir, A. W. (1997). *Al- Munawir Kamus Arab Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (1996). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Daar Al-Fikr.
- AL-Shafi'i, M. (1986). *Al-Umm*. Dar al Kutub al-ilmiyyah.
- Ambary, H. M. (1996). *Suplemen Ensiklopedi Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Amrullāh, A. al-M. bin A. al-K. (1988). *Tafsir al-Azhār* (juz 22). Pustaka Panjimas.

- Andaryuni, L. (2017). Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda. *Fenomena: Jurnal Penelitian IAIN Samarinda*, 9(Vol 9, No 2). <https://doi.org/http://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946>
- Ani, A. (2018). Perempuan dan Karir. *Muwazah*, 9(2), 151–161. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v9i2.1126>
- As- Shabuni, I. (1987). *Tafsir As-Shabuni*.
- Aş-Şābūniy, M. ‘Aliy. (2007). *Rawā’i ‘ul Bayān Tafsīr Āyātil Ahkām* (1st ed.). Dāruş Şābūniy.
- As-Sāyis, M. ‘Aliy, As-subkiy, ‘Abdul Laţīf, & Karsūn, M. I. (2009). *Tafsīr Āyātil Ahkām* (Ḥasan as-Samāḥiy Suwaidān & M. Dīb Mistū (eds.); 6th ed.). Dār Ibnu Kaşīr.
- Ash- Shidiqie, T. H. (1971). *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Ayub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance*. Gramedia Pustaka Utama.
- Azid, R. (2016). *Kitab Terlengkap Biografi Imam Mahzab*. saufa.
- Aziz, A. (2017). Relasi gender dalam membentuk keluarga harmoni. *Harkat*, 12(2), 27–37. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/download/7713/4288>
- Bukhari, I. (1992). *Shahih Bukhari* (Dar al kutub al alamiyah (ed.)).
- Butler, J. (2011). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. In *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. <https://doi.org/10.4324/9780203824979>
- Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiwati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>
- Dusche, M. (2012). Development as Freedom. In *Identity Politics in India and Europe*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.4135/9788132108009.n31>
- Effendi, S. (2009). *Ushul Fiqh, Cet ke- 3*,. Kencana.
- Fadillah, R., & Syahruji, S. (2023). Hak Cerai Bagi Perempuan Dan Faktor

- Penyebabnya. *Mitsaqan Ghalizan*, 3(1), 1–15.
<https://doi.org/10.33084/mg.v3i1.5449>
- Fajar Fadillah, F., & Masrun, M. (2020). Kadar Nafkah Keluarga menurut Ibn Qudāmah (Analisis Terhadap Kitab al-Mughniy). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(1), 19–35. <https://doi.org/10.24014/af.v19i1.7096>
- Fajriani, N. dkk. (2020). Analisis Sosiologis Terhadap Kedudukan Hakim Perempuan (Perspektif Imam Hanafi dan Ibnu Jarir Ath- Thabari). *Shautuna*, 1, 81–95.
- Ferdiana, D. (2024). Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01), 2339–2800. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>
- Fitri, A., Bahar, M., Azwar, Z., Ediz, M. H., & Yusrial. (2024). Divorce Lawsuit Due to Impotence Perspective Maslahat Theory: Case study of the Andoolo Religious Court Decision, Southeast Sulawesi. *El-Usrah*, 7(1), 220–236. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.21860>
- Ghandur, A.-. (1967). *Al-Talak Fi Al-Syariat Al-Islamiyati Wa Al-Qanun*. Da Al-Ma'arif.
- Ghozali, A. R. (2012). *Fiqh Munakahat*. Kencana Preneda Media Group.
- Hamid, Z. (1978). *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia*. Bina Cipta.
- Harahap, R. D. K. A. (2013). Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 361. <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>
- Hariadi, H., Kurnia Lestari, A., Lukman Irawan, M. N., & Arrohmahan, A. (2023). Analisis Gender Tentang Kesetaraan Hak Talak Bagi Perempuan. *Jurnal Insan Cendekia*, 4(1), 36–43. <https://doi.org/10.54012/jurnalinsancendekia.v4i1.256>
- Hasan, M. A. (2002). *Perbandingan Mazhab*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendika, Y., & Armi, M. I. (2022). Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Kafa 'ah Dalam Perkawinan. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 170–181. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/201>

- Hidayah, A. (2024). *Analysis Of Divorce Law Through Electronic Media In The Perspective Of Positive Law And Islamic Fiqh*. 40(2).
- Hidayati, H. (2020). Pemberdayaan Perempuan pada Masa Rasulullah: Suatu Kajian Historis. *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(1), 29–41. <http://ejurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/dirayah/article/view/19>
- Hurriyah. (2024). Divorce and Its Practices Before A Religious Court; A Perspective Analysis of Islamic Legal. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 16–32. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/8066>
- Ibn Qudāmah. (1983). *Al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.
- Ibnu Ḥanbal, A. (2001). *Musnad al-Imām Aḥmad Bin Ḥambal* ('Abdullāh Ibn 'Abdul Muḥsin At-Turkiy, S. Al-Arna'ūt, 'Ādil Mursyid, & Dkk (eds.); 1st ed.). Muassasaturl-Risālah.
- Ibnu Qudamah. (1994). Al-Kafi fi Fiqhu Ibnu Hanbal. In *Jilid 3* (pp. 222–223). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Idris, M. N., & Anita, K. (2024). *Forced Divorce Polemic : Comparative Analysis of the Hanafi and Shafii Schools of Thought Based on data from the Central Statistics Agency (Badan Pusat Statistik , BPS) , there were 447 , 743 divorce cases in the Muslim community throughout 2021 . This r.* 10(1), 1–23. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.848.5>
- Imam An-Nawawi. (2011). *Syarah Shahih Muslim*. Pustaka Azzam.
- Imamul Muttaqin. (2020). Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 48–67. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.95>
- Islam, M. (2022). Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi. *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i1.45>
- Kamalia, E. R. (2021). Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Alih Fungsi Harta Wakaf. *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan*, 3(1), 22–36.

- Karim, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Khallāf, 'Abdul Wahhāb. (2009). *'Ilmu Uṣūlil Fiqh* (8th ed.). Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah.
- Komalasari. (2022). Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Bain menurut Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16144–16151.
- Latief, H. . (1981). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Malik bin Anas. (1994). *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Daar Al-kutub al'ilmiah.
- Malik Bin Anas. (1989). *Al-Muwatta'*. Dar ikhya' Al Ulum.
- Malmi, A. M. (2020). *Asbab al-Nuzūl: Studi Pendalaman al-Quran*.
- Maolana, W. (2019). Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith). *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4487>
- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Penerbit Mijan.
- Mudzhar, M. A. (2012). *Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)*. 95.
- Mufidah. (2009). *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaann*. UIN Maliki Press.
- Muhammad, Ali, dan A.-S. (2016). *Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah, terj. Abdul Rosyad Shiddiq dan Siti Salma Adam Mustof*. Pustaka Al-Kautsar.
- Muin, F. M. F. (2022). Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan. *Legal Studies Journal*, 2(1), 13–29. <https://doi.org/10.33650/laj.v2i1.3390>
- Muslim bin Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisābūrī. (n.d.). *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-'Adli 'ani al-'Adli ilā Rasūlillahi Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*.
- Musthofa. (2003). *Pembaharuan Hukum Islam di Kuwait: Studi Wasiat Wajibah, dalam Atho Muzdhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*,.

- N. Alolas, F. Ah, U. I. et al. (2015). *Studi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai. 1*, 1–118.
- Nasruloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1), 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>
- Nasution, R. H. (2018). Talak Menurut Hukum Islam. *Al-Hadi*, III(2), 707–716. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/357>
- Ningrum, I. S. (2017). Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan. *FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*, 5(1), 93–108. <http://www.jurnalfai-uikabogor.org>
- P.Wiratraman, H. (2018). Peneitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya. *Hukum Dan Keadilan*, 5(3), 1–2.
- Pasaribu, C. (2004). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika.
- Qudamah, A. M. bin 'Abdullāh bin A. bin M. (2002). *Raudah al-Nāẓir wa Junnah al-Manāẓir fī Uṣūl al-Fiqh*. Muassasah al-Rayyan li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī.
- Qudamah, I. (1997). *Al-Mughni*. Daru Alim Al Kutub.
- Qudamah, I. (2007). *Al Mughni, Alih Bahasa Oleh Amir Hamzah*. Pustaka Azam.
- Rahayu, N. (2012). Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia (Gender Equality in the Rule of Law in Indonesian and Implementation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 15–32.
- Rahma, F. (2023). Konsep Perlindungan Perempuan Dalam Pernikahan Analisis Pendapat Ibn Qudāmah Dalam Kitab Al-Mughni. *Al -Ahkam*, 4, 13. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.15548/alahkam.v14i1.6276>
- Rofi'ah, S. (2016). Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender. *Muwazah*, 7(2). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.515>
- Rusyd, I. (1989). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. DarAl Jiil.
- Sabiq, S. (1973). *Fiqh Sunnah*. Daar Al-Fikr.

- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Sunnah*. PT. Almaa'arif.
- Sarkhasi. (1993). *Al-Mabsuth*. Daar Al- Ma'arif.
- Suhendi, hendi. (2011). *Fiqh Muamalah*. PT.Rajagrafindo Persada.
- Syafi'i, I. M. I. S. (2008). *Al- Umm*. Dar al-Hadits.
- Syarabasyi, A. (1987). *Himpunan Fatwa*. Al-ikhlas.
- Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh cet 4*. Kencana.
- Tarbiyah, K. F., & Alauddin, K. U. I. N. (n.d.). *Gender dalam perspektif islam*. 1, 55–68.
- Taufik, M., Hasnani, & Suhartina. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang). *Sosiologia: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 5(1), 50–65. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Tutik Hamidah. (2011). *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. UIN Maliki Press.
- Ya'la, I. A. (1932). *Tabaqat al-Hanabilah*. Maktabah Al-Arabiah.
- Yanggo, T. H. (1997). *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Logos Wacana Ilmu.
- Yunus, M. (1973). *Kamus Bahasa Arab Indonesia*.
- Yunus, M. (1990). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidayakarya Agung.
- Yusrina, A., Budiyati, S., Yumna, A., & Akhmadi. (2011). *Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam , Jawa Barat , Kalimantan Barat , dan Nusa Tenggara Timur*.
- Zahro. (2022). Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Menjatuhkan talak Tiga Sekaligus. *Maslahah : Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, 13(2), 1–12. <https://doi.org/10.20956/xxxx/xxxx>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123. <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26>
- Zubaidah, S. (2018). *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam*

Islam. CV. Widya Puspita.

Zuhaili, W. (1996). *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Dar al fikr.

Zuhaili, W. (2006). *Ushul Fiqh Al Islami, Juz 2,*. Dar al fikr.

Zuhro, S. (2008). *Politik Gender: Pmikiran, Teori dan Gerakan*. Gramedia Pustaka Umum.

Zulfikri. (2015). *Periodesasi yang digunakan disini adalah periodesasi yang dikemukakan oleh Muhammad al-Khudri Bek. Muhammad al-Khudri Bek Tarikh al- Tasyri' al -Islami (Beirut: Dar al-Kitab al- „Ilmiyyah, t.th), h. 4. 1. 1–25.*

